



# Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

## **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Pers memiliki ruang kebebasan untuk menjalankan perannya mulai dari penyebar informasi, mendidik, menghibur, serta membangun opini. Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat menyebutkan salah satu fungsi pertama pers yang bertanggung jawab adalah fungsi informatif, yaitu memberikan informasi atau berita kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur (Kusumaningrat, 2005, h. 27).

Kehidupan dan dinamika media juga mengalami perkembangan tidak hanya sebagai institusi penyampai informasi, namun sudah menjadi sebuah industri. Kondisi ini memberi konsekuensi logis media mau tidak mau harus mempertimbangkan faktor ekonomi yang berorientasi pada profit. Akibatnya, kepentingan pasar terutama pengiklan serta selera konsumen menjadi tujuan utama media dengan mengabaikan idealisme. Artinya, segala peliputan media termasuk liputan dan kemasan tentang realitas politik dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi (Hamad, 2004, h. 5).

Dalam praktiknya, media memiliki cara tersendiri dalam mewacanakan realitas. Realitas yang dikemas dan disajikan media seringkali menggunakan bahasa dan simbol-simbol tertentu sehingga menimbulkan multi tafsir. Media bisa

menjadi sarana kepentingan kelompok tertentu untuk melakukan dominasi, menguasai, dan memengaruhi pikiran khalayak. Media mengkonstruksi realitas sesuai kepentingannya untuk menanamkan ideologi tertentu yang tidak disadari oleh masyarakat.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Eriyanto (2001, h. 58), media dipandang sebagai instrumen ideologi. Media tidak dipandang sebagai wilayah yang netral di mana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok ditampung. Media justru bisa menjadi subjek, di mana ia mengkonstruksi realitas atas penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan kepada khalayak. Dengan demikian, media berperan mendefinisikan realitas.

Pengemasan realitas dengan cara-cara tertentu bukanlah sesuatu yang sifatnya netral dan independen, karena media tidak terlepas dari kepentingan dan ideologi tertentu. Media tentu saja memiliki ideologi, sistem, dan kontrol produksi. Hal ini terlihat dari kebijakan redaksional, sikap politik, dan budaya jurnalistik. Elemen-elemen tersebut akan menentukan pemilihan isi pesan, penggunaan simbol-simbol, serta penempatan strategis terkait kekuatan pada aspek-aspek tertentu.

Persoalan pertambangan tetap menjadi sesuatu yang menarik untuk diberitakan. Dalam bentuk apapun, pertambangan selalu memiliki dua sisi mata uang yang kontras. Di satu sisi, ia dipandang mampu memberikan manfaat ekonomis dalam bentuk pemasukan pendapatan bagi pemerintah, namun di sisi lain adanya dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Ketua Badan Pengarah

Jaringan Advokasi Tambang Siti Maimunah mengatakan, tak dimungkiri pertambangan memberikan pendapatan bagi negara dan juga pemerintah daerah. Tetapi yang lebih tak terbantahkan adalah bagaimana daya rusak sektor ini berkontribusi terhadap pemiskinan di sekitar kawasan (Ayudi, 2011, h. 1).

Dua hal inilah yang menjadi persoalan pada kasus perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memilih pemberitaan terkait perpanjangan kontrak karya Freeport sebagai kajian, karena kasus ini dapat dianalisis tentang makna yang tersembunyi di balik teks dan ideologi yang melatarbelakangi pewacanaan teks.

Tepat pada 9 Juli 2015, kasus perpanjangan kontrak karya Freeport memanas seiring dengan surat yang dilayangkan Freeport kepada pemerintah Indonesia terkait permohonan perpanjangan operasi. Kasus ini semakin menguat pada 7 Oktober 2015 ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengirimkan surat kepada Freeport. Isinya: perusahaan asal Amerika Serikat ini bisa melanjutkan operasi hingga 30 Desember 2021. Caranya, menurut Sudirman, merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Tempo, 2015, h. 83).

Pernyataan Sudirman memantik perdebatan. Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menilai Sudirman *keblinger* (Jawa: keliru) karena tidak mengikuti aturan. Pemerintah dinilai terlalu membela Freeport. Padahal, sesuai dengan aturan pemerintah, perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dua tahun

menjelang kontrak berakhir. Kehadiran Freeport pun tidak begitu menguntungkan bagi Indonesia. Selama dari 1967-2014, Freeport hanya membayar royalti satu persen yang seharusnya enam sampai tujuh persen (Tempo, 2015, h. 86).

Dalam wawancara khusus Presiden Joko Widodo di program *Mata Najwa* (21 Oktober 2015), Jokowi menengahi permasalahan itu dengan mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian perpanjangan kontrak karya. Setidaknya ada lima syarat yang harus dilakukan Freeport sebelum habis kontrak pada tahun 2021 nanti, yakni kenaikan royalti, pengutamaan penggunaan tenaga kerja masyarakat lokal Papua, pembangunan pengelolahan dan pemurnian dalam negeri (*smelter*), pembangunan untuk Papua, dan divestasi.

Mulai saat itulah wacana pembangunan banyak bermunculan di media. Wacana pembangunan tersebut berhasil membuat sebagian warga pro-Freeport mendapatkan sorotan. Ketua Papuan Brotherhood, Silas Natkime mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia merupakan napas bagi warga Papua, karena selama berada di Papua, Freeport telah memberikan kontribusi yang sangat banyak di berbagai bidang dan sektor ("Papuan Brotherhood: UU Minerba Ikat Kesejahteraan Rakyat Papua", 2014, para. 2). Kehadiran Freeport dinilai telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua, khususnya di Timika, dengan berbagai program bantuan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sarana-prasarana. Di sinilah tedapat peran surat kabar lokal *Radar Timika* dalam melegitimasi wacana pembangunan yang telah dibawa oleh Freeport kepada masyarakat lokal di Timika tersebut. Ditambah lagi, "Jangan Ada PHK, Smelter

Harus di Mimika" (2015, para. 9-10) melaporkan bahwa para demonstran yang tergabung dari 28 Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energy dan Pertambangan (PUK-SKEP) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang ada di lingkup kerja PT Freeport Indonesia (PTFI) meminta DPRD Mimika untuk menjamin tidak ada PHK bagi karyawan di Freeport dan smelter harus dibangun di Mimika, karena Freeport telah berdampak terhadap kehidupan orang banyak. Surat kabar *Radar Timika* berhasil menggambarkan betapa penting dan berpengaruhnya Freeport bagi perekonomian rakyat Papua, terutama di tingkat lokal Timika dan sekitarnya.

Wacana pembangunan ekonomi nasional di Papua pun berlanjut. PT Freeport Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu sumber pendanaan terbesar dalam pembangunan ekonomi di Papua. Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan bahwa hampir seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua dari Freeport, yakni sebesar Rp 200 miliar per tahun ("Gubernur: Perpanjangan KK PTFI Adalah Keharusan", 2015, para. 1). Tak hanya itu, Lukas Enembe juga mengatakan bahwa seluruh aspek kehidupan di Papua masih sangat tergantung dengan Freeport. Kehadiran Freeport merupakan salah satu anugerah Tuhan yang patut disyukuri oleh masyarakat Papua ("Gubernur: Kalau Tidak Kenal Papua, Jangan Bicara, 2015, para. 2).

Oleh karena itu, penelitian akan fokus pada artikel-artikel mengenai pemberitaan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia oleh surat kabar *Radar Timika* periode Januari 2014 sampai Desember 2015. Periode tersebut

dipilih karena peneliti melihat banyak sekali terjadi pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat pro-Freeport dan Freeport dalam usahanya memunculkan wacana pembangunan. Hal itu dilakukan karena kontrak karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 30 Desember 2021 nanti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berpijak pada paradigma kritis dan menggunakan pendekatan wacana kritis dari Norman Fairclough. Penelitian dilakukan secara multi level analisis mulai dari analisis teks, analisis proses, produksi, konsumsi teks, serta analisis sosiokultural yang berkembang di seputar wacana.

Untuk lebih memperdalam telaah terhadap pemberitaan Freeport di level teks, maka digunakan metode analisis framing Robert M. Entman. Penggunaan metode framing Entman ini dimaksudkan untuk menganalisis konstruksi surat kabar *Radar Timika* dalam mengemas wacana pembangunan. Dengan demikian, kajian framing dalam penelitian akan mencari makna-makna yang diwacanakan oleh media melalui aspek seleksi isu dan penekanan aspek-aspek tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji realitas dalam teks media khususnya dalam pemberitaan perpanjangan kontrak karya Freeport dengan berbagai macam kepentingan yang ada di balik proses pembuatan teks serta hubungannya dengan konteks makro yang mencakup kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Karena setiap teks memiliki makna yang ingin direpresentasikan, maka analisis teks untuk melihat adanya konstruksi realitas yang dibangun oleh media tersebut menjadi sangat penting. Dengan demikian,

fokus penelitian ini adalah "Bagaimana Wacana Pembangunan pada Pemberitaan Pemberitaan Perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia di Surat Kabar Lokal *Radar Timika*?".

### 1.2. PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana wacana pembangunan yang ditampilkan oleh surat kabar Radar Timika terkait pemberitaan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia?
- 2) Bagaimana konstruksi realitas yang ditampilkan oleh surat kabar Radar Timika terkait pemberitaan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia?
- 3) Bagaimana proses produksi teks di surat kabar *Radar Timika* terkait pemberitaan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia?
- 4) Bagaimana konteks sosiokultural dalam memengaruhi proses produksi teks di pemberitaan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia pada surat kabar *Radar Timika*?

# UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

#### 1.3. BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah teks, konteks, dan kognisi sosial wacana pembangunan di pemberitaan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia pada surat kabar *Radar Timika* periode Januari 2014-Desember 2015. Teks akan dikaji menggunakan analisis framing dari Robert M. Entman. Selanjutnya, untuk mengetahui secara mendalam bagaimana teks diproduksi, maka peneliti melakukan pencarian data dengan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) pada informan di organisasi media tersebut. Setelah itu, peneliti akan menghubungkan antar analisis teks dan hasil wawancara dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik di media tersebut.

### 1.4. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui wacana pembangunan yang ditampilkan oleh surat kabar *Radar Timika* terkait pemberitaan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui konstruksi realitas tentang pemberitaan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia di surat kabar *Radar Timika*.
- 3) Untuk mengetahui proses produksi teks terkait pemberitaan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia di surat kabar *Radar Timika*.

4) Untuk mengetahui konteks sosiokultural yang memengaruhi proses produksi teks dalam pemberitaan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia di surat kabar *Radar Timika*.

### 1.5. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

### 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian wacana kritis dalam media surat kabar dalam konteks surat kabar lokal dengan menggunakan pendekatan Fairclough.

### 2) Kegunaan Praktis

- a) Mengkritik dan mentransformasikan hubungan sosial yang timpang antara kelompok penguasa dan kelompok bawah.
- b) Masyarakat di Timika mempunyai keberdayaan (*empowerment*) untuk melakukan pergerakan dan menyuarakan nasibnya atas ketidakadilan-ketidakadilan yang telah diperolehnya dari praktik sosial melalui wacana pembangunan yang ditampilkan oleh surat kabar *Radar Timika*.
- c) Memberikan kesadaran sosial bagi masyarakat di Timika agar memperbaiki dan mengubah kondisi kehidupan manusia yang tertindas bahwa realitas sosial yang ditampilkan oleh surat kabar *Radar Timika* adalah semu.